

Studi Bentuk Pengelolaan Sampah di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan Secara Partisipatif

Shafiyah Mizanurrahmah, Lely Syiddatul

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung Jl Tamansari No 1 Bandung 40116

email: shafiyahmizanurrahmah@yahoo.com

Abstrak. Melihat meningkatnya volume sampah, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengeluarkan kebijakan pengelolaan sampah yaitu Peraturan Daerah No 3 Tahun 2010 dengan program salah satunya 3R (Reuse, Recycle, dan Reduce) guna mengurangi sampah dari sumbernya. Seiring berjalannya program pemerintah dengan sistem top-down (kebijakan) munculnya beberapa permasalahan pengelolaan sampah, yaitu:

- a) Kurangnya sosialisasi pemerintah pada masyarakat dan pengurus sampah tingkat RW dalam meningkatkan pengelolaan sampah
- b) Regulasi tentang penanganan sampah belum tersosialisasikan
- c) TPST 3R yang telah disediakan pemerintah disetiap kecamatan belum berjalan dengan baik.

Permasalahan diatas menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan adalah salah satu bentuk perencanaan yang tidak partisipatif. Tujuan dari Studi Bentuk Pengelolaan Sampah di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan Secara Partisipatif ini merumuskan bentuk – bentuk pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan berdasarkan aspirasi masyarakat, pemerintah dan stakeholder terkait. Metode yang digunakan adalah Rapid Rural Appraisal, Participatory Rural Appraisal, dan Forum Group Discussion yang memacu kepada 5 variabel yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah di Perkotaan: (a) Penerapan teknologi yang tepat guna, (b) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, (c) Perlunya mekanisme keuntungan dalam pengelolaan sampah, (d) Optimalisasi TPA sampah, (e) Sistem kelembagaan pengelolaan sampah yang terintegrasi. Hasil analisis dan rekomendasi dari studi ini adalah (1) Perlunya kajian sosialisasi tentang jenis sampah diseluruh kelurahan, diutamakan ketua RW secara berjenjang dan berkesinambungan, (2) Pemilahan sampah tingkat rumah tangga yang telah ada di Kebijakan No 3 Tahun 2010 perlu ditegaskan dan dibuat sanksi, (3) Mensosialisasikan pengelolaan sampah di sosial media, (4) Perlunya mengasah kreativitas kepada ibu-ibu kompleks untuk membuat kerajinan tangan dari olahan sampah anorganik menjadi barang ekonomi, (5) Mengadakan organisasi atau forum khusus untuk membahas sampah dan menindaklanjuti pengelolannya.

Kata kunci: Sampah, Pengelolaan Sampah, Partisipatif

A. Pendahuluan

Pembangunan perkotaan tidak akan terlepas dari pengelolaan sampah yang ditimbulkan dari aktivitas perkotaan. Timbulan sampah kota menunjukkan trend yang terus meningkat, sejalan dengan pertumbuhan penduduk, meningkatnya kegiatan pembangunan, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Pengelolaan sampah bila dilakukan dengan kurang baik akan menjadi sumber masalah, baik sosial maupun lingkungan.

Peran serta masyarakat sangat mendukung program pengelolaan sampah suatu wilayah. Peran masyarakat dalam bidang persampahan adalah proses dimana orang sebagai konsumen sekaligus produsen pelayanan persampahan dan sebagai warga mempengaruhi kualitas dan kelancaran prasarana yang tersedia untuk mereka.

Partisipatif dalam pengelolaan sampah akan menghasilkan kebijakan yang disetujui oleh pemerintah dan masyarakat.

Kota Tangerang Selatan sebagaimana kota – kota lain di Indonesia, jumlah penduduknya semakin meningkat dari tahun ketahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2005 – 2006 jumlah penduduk di kota pemekaran Kabupaten Tangerang itu mencapai 900.000 jiwa. Namun sejak 2008 jumlah penduduk itu melonjak menjadi di atas 1 juta jiwa. Bahkan 2012 sudah mencapai 1,3 juta jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk akan menyebabkan meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan.

Melihat meningkatnya volume sampah, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengeluarkan kebijakan pengelolaan sampah yaitu Peraturan Daerah No 3 Tahun 2010 dengan program salah satunya 3R (*Reuse, Recycle, dan Reduce*) guna mengurangi sampah dari sumbernya.

Seiring berjalannya program pemerintah dengan sistem top-down (kebijakan) munculnya beberapa permasalahan pengelolaan sampah, yaitu:

- a) Kurangnya sosialisasi pemerintah pada masyarakat dan pengurus sampah tingkat RW dalam meningkatkan pengelolaan sampah
- b) Regulasi tentang penanganan sampah belum tersosialisasikan
- c) TPST 3R yang telah disediakan pemerintah di setiap kecamatan belum berjalan dengan baik.

Permasalahan diatas menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan adalah salah satu bentuk perencanaan yang tidak partisipatif. Munculnya permasalahan yang disebabkan pengelolaan sampah yang tidak partisipatif ini juga dikarenakan oleh masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

Perlu adanya sinkronisasi pemerintah dengan masyarakat dalam program pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan, dalam kajian “**Studi Bentuk Pengelolaan Sampah di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan Secara Partisipatif**” ini diterapkan beberapa pendekatan partisipatif seperti *Rapid Rural Appraisal*, *Participatory Rural Appraisal*, dan *Forum Group Discussion* yang diperlukan untuk mencari bentuk pengelolaan sampah secara partisipatif.

Untuk itu rumusan masalah yang diajukan dalam studi ini adalah bentuk pengelolaan sampah seperti apa yang secara partisipatif dapat diterapkan di Kota Tangerang Selatan?

B. Tinjauan Pustaka

Sampah adalah benda atau sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai atau sesuatu yang harus dibuang, dan umumnya bersifat padat yang dapat mencemari lingkungan dan tidak/belum bersifat ekonomis, yang bersifat zat organik dan zat anorganik (tidak termasuk limbah berbahaya dan beracun) yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan.

Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu sebagai salah satu upaya pengelolaan Sampah Perkotaan adalah konsep rencana pengelolaan sampah perlu dibuat dengan tujuan mengembangkan suatu sistem pengelolaan sampah yang modern, dapat diandalkan dan efisien dengan teknologi yang ramah lingkungan. Dalam sistem tersebut harus dapat melayani seluruh penduduk, meningkatkan standar kesehatan masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat dan pihak swasta untuk berpartisipasi aktif.

Dengan demikian perlu adanya kebijakan pengelolaan sampah perkotaan yang ditetapkan di kota-kota di Indonesia meliputi 5 (lima) kegiatan, yaitu:

1. Penerapan Teknologi
2. Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan
3. Mekanisme keuntungan dalam pengelolaan sampah
4. Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA)
5. Kelembagaan dalam pengelolaan sampah yang ideal

C. Metodologi

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi yang terkait dan data telah terdokumentasi dengan menggunakan teknik: Studi literatur dan Instansional.

Sumber data primer dengan *Personal*, yaitu orang yang memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan yang relevan dengan tema penelitian. Yang termasuk dalam hal ini adalah Pengurus RW, Pengelola Sampah, masyarakat pelaku, dan Pejabat Dinas Kebersihan. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan kuisioner.

Metode *Rapid Rural Appraisal*

Rapid Rural Appraisal adalah sebuah metode penelitian dari suatu partisipasi tim, dimana analisis daya yang ada akan menghasilkan suatu bentuk pemahaman terhadap kondisi tertentu. Dalam survey yang dilakukan di Kota Tangerang Selatan ini diperlukan pendekatan RRA untuk mengambil beberapa data awal seperti:

- Lokasi TPS dan TPA
- Daftar beberapa tokoh masyarakat yang berhubungan dengan pengelolaan masyarakat
- Mengambil beberapa data umum seperti: Kependudukan, Perekonomian, Aspek fisik dan lain - lain

Metode *Participatory Rural Appraisal*

Participatory Rural Appraisal adalah suatu metode untuk memahami desa secara partisipatif, dalam hal permasalahan dan upata antisipasi yan dibutuhkan, dengan berdasarkan pada potensi dan kendala sumber daya yang tersedia.

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat, sesuai dengan tujuan studi. Maka survey yang dilakukan sesuai dengan metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Village Story

Menelusuri perjalanan sejarah pengelolaan sampah untuk memahami situasi mereka sekarang dengan perspektif menggunakan pandangan dari pengalaman masa lalu

b. Analisis Kecenderungan

Perubahan pengelolaan sampah dari faktor – faktor yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, teknik ini berlanjut dari perubahan jaman dari sejarah pengelolaan sampah.

Informasi yang diperoleh adalah mengkaji perubahan jenis – jenis pengelolaan sampah yang paling berpengaruh terhadap keadaan masa kini, kepada lingkungan, dan kecenderungan ke depannya.

c. Kegiatan Harian

Dibuat untuk mengetahui kondisi pengelolaan sampah dengan jadwal setiap harinya, khususnya dalam hal:

- Kapan (jam berapa) suatu pekerjaan dilakukan
- Siapa yang melakukan dan berapa lama
- Bagaimana pembagian beban kerjanya

Tujuan dari teknik ini yaitu:

1. Teridentifikasinya aktivitas harian pekerja dalam pengelolaan sampah
2. Daftar masalah, potensi dan alternatif pemecahannya

d. Kajian Kelembagaan

Tahapan ini bertujuan untuk mengkaji sistem organisasi dalam pengelolaan sampah. Informasi yang diharapkan adalah:

- aturan pengelolaan,
- fasilitas pengelolaan,
- personal pendukung (siapa pihak yang berperan, apa peran masing – masing pihak, kontribusi peran, dan apa kebutuhan pengelolaan yang dapat dipenuhi)

e. Matriks masalah

Ini adalah tahap akhir disaat semua tahap metode telah digunakan pengumpulan data berdasarkan sejarah, kebiasaan sehari, analisis kecenderungan, maupun lembaga yang terkait dijadikan dalam satu matriks

Metode Diskusi Kelompok Terfokus/*Forum Group Discussion (FGD)*

FGD adalah *suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok*. Dalam kaitan ini, baik berkedudukan sebagai metode primer atau sekunder, data yang diperoleh dari FGD adalah **data kualitatif**.

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Hasil Kegiatan *Rapid Rural Appraisal* dalam Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan

1. Penerapan Teknologi, Rata – rata masyarakat di Kecamatan Setu belum mengetahui teknologi persampahan. Jadi penerapan teknologi pengomposan telah berjalan dengan baik di RW 01 dan RW 02, sedangkan tidak adanya penerapan teknologi di RW 08, RW 11, dan RW 13 yang berarti tidak adanya keinginan mengurangi volume sampah di Kota Tangerang Selatan.
2. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah derajat partisipasi RW 01 dan RW 02 ini berada di derajat **Konsultasi** dengan adanya komunikasi yang bersifat dua arah, tetapi masih bersifat partisipasi yang ritual. Sudah ada penjangkaran aspirasi, telah ada aturan pengajuan usulan, telah ada harapan bahwa aspirasi masyarakat akan didengarkan, tapi belum ada jaminan apakah aspirasi tersebut akan dilaksanakan ataupun perubahan akan terjadi.

B. Kajian Hasil Kegiatan *Participatory Rural Appraisal* dalam Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang Selatan

1. Sejarah pengelolaan sampah

a. Sebelum tahun 2000

Pengelolaan sampah yang dilakukan pada saat itu masih sangat kuno yaitu dikumpulkan disuatu tempat, diangkut, dan dibuang ke TPA, dikarenakan

kurangnya perhatian pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Cisauk sehingga masyarakat hanya ingin mengurangi sampah dengan dibakar dan sebagian lagi ditimbun.

b. Tahun 2001-2009

Pemerintah mulai membagikan beberapa sarana persampahan seperti sapu jalan, tempat sampah, motor sampah, mobil pick up, truck arm roll, kontainer arm roll, loader, skit loader, dll. Dengan adanya penambahan jumlah sarana persampahan pengangkutan sampah lebih rutin 2 hari sekali.

c. Tahun 2009 - sekarang

Tahun 2009 awal didirikannya TPA Cipeucang yang khusus untuk sampah di Kota Tangerang Selatan. Dengan pengolahan sampah *open dumping* di awal tahun 2010 mengganggu warga sekitar saat sampah hanya ditumpuk tanpa adanya penutup maupun adanya saluran lindi.

Pemerintah mulai melakukan sosialisasi pengelolaan sampah dari mulai memilah sampah sampai menjadikan sampah sebagai kompos. Setelah itu didirikan lokasi TPST 3R (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) *Recycle, Reuse, dan Reduce* dengan didirikannya TPST 3R banyaknya sosialisasi dengan membagikan sarana prasarana yang berguna untuk mengelola sampah seperti sampah organik dan anorganik yang disebar beberapa daerah, pencacah sampah organik, motor sampah per TPST, dan alat biopori.

d. Analisis Kebijakan

RW 01 dan RW 02 mengandalkan petugas sampah sebagai pekerja dalam pengomposan, sedangkan ketua dari tiap TPST 3R yaitu ketua RW tersebut dengan pengurus dibantu oleh Ibu RW dan beberapa ibu – ibu yang ingin ikut membantu. Tidak adanya organisasi yang dibentuk dimaksudkan bahwa semua orang dari generasi manapun dapat ikut mengelola sampah, anggota dari kelembagaan tidak resmi ini adalah warga RW 01 dan RW 02 dengan mengikuti program pemilahan guna membantu petugas sampah. Sedangkan, RW 08, RW 11, dan RW 13 tidak melakukan pengelolaan sampah yang juga berarti tidak ada kelembagaan yang bergerak didalamnya.

e. Kegiatan Harian

RW 01 dan RW 02 yang telah mengikuti program pengomposan dan melakukan prosesnya dengan baik.

Kesulitan petugas sampah yaitu pada saat warga malas memilah sampah sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk pemilahan di okasi TPST 3R.

Sedangkan, jadwal keseharian di RW 08, RW 11, dan RW 13 berbanding terbalik dengan pengelolaan di RW 01 dan RW 02, mereka tidak melakukan pengelolaan sampah secara terpadu. Minimnya warga yang mempunyai niat untuk memilah sampah, dan tidak adanya petugas sampah yang bertugas untuk mengambil sampah.

f. Analisis Kecenderungan

Kecenderungan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah dimulai ketika masyarakat tidak peduli akan volume sampah yang semakin meningkat. Setelah adanya sosialisasi dari pemerintah, pemilahan sampah hanya dilakukan beberapa rumah tangga. Adanya kecenderungan kepedulian masyarakat pengelolaan sampah, mereka menginginkan hidup sehat tetapi tidak ada kontribusi dari diri masyarakat untuk lebih mengelola sampah atau mengurangi timbulan sampah.

C. Analisis Hasil *Forum Group Discussion*

Kesimpulan dari hasil Forum Group Discussion diatas yaitu:

1. Penerapan Teknologi, solusi:
 - a) Pemerintah melakukan survey di setiap Kelurahan di Kota Tangerang Selatan untuk melihat kondisi pengelolaan sampah.
 - b) Pelayanan pengelolaan sampah perlu dilakukan di tingkat RW.
 - c) Sarana tempat sampah organik dan anorganik diperbanyak .
 - d) Perlunya pewarnaan tempat sampah organik dan anorganik, lalu dibakukan sehingga seluruh masyarakat Kota Tangerang Selatan paham bedanya.
 - e) Setiap warga bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah, sehingga sampah telah dipilah di setiap rumah
 - f) Mewajibkan petugas sampah mengangkut sampah perjenis sampah
 - g) Memanfaatkan sebaik-baiknya lokasi TPST 3R yang telah disediakan pemerintah
 - h) Pedagang diwajibkan memilih sampah yang dihasilkan
2. Peran Serta Masyarakat, solusi:
 - a) Perlunya kajian sosialisasi tentang jenis sampah diseluruh kelurahan, diutamakan ketua RW secara berjenjang dan berkesinambungan
 - b) Memberikan penghargaan bagi pengelolaan sampah yang terorganisir
 - c) Mensosialisasikan solusi sampah di FB dan beberapa sosial media lainnya
 - d) Melakukan kerja bakti sebagai praktek dari sosialisasi yang disampaikan
 - e) Memberlakukan peraturan dan sanksi yang tegas dan diterapkan kepada seluruh kalangan masyarakat
3. Mekanisme keuntungan dalam pengelolaan sampah, solusi:
 - a) Perlunya mengasah kreativitas kepada ibu-ibu kompleks untuk membuat kerajinan tangan dari olahan sampah anorganik menjadi barang ekonomi
 - b) Bank sampah diadakan di tingkat RW
4. Sistem Kelembagaan, solusi:
 - a) Mengadakan organisasi atau forum khusus untuk membahas sampah dan menindaklanjuti pengelolaannya
 - b) Perlu adanya pengawasan ketat setiap yang membuang sampah di tempat tersebut ditarik bayaran

Daftar Pustaka

- Aboejoewono, A. 1985. *Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya; Wilayah DKI Jakarta Sebagai Suatu Kasus*. Jakarta
- Artiningsih Ni Komang Ayu, 2008. *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Sampangan dan Jomblang Kota Semarang*. Tesis. Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, Semarang
- Aryenti, 2011. *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dengan Cara 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Lingkungan Permukiman Ditinjau dari Segi Sosial Ekonomi Masyarakat*. Jurnal Permukiman Pusat Litbang Permukiman, Kota Bandung

- Ayuningtyas Tisna dan Trihadiningrum Yulinah, 2013. *Kajian Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya*. Kajian Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Jurusan Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Kota Surabaya
- Dani Cecep Sucipto, 2012. *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*. Cetakan Pertama. Gosyen Publishing, Kota Yogyakarta. Hal 15-17
- Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman, 2013. *Bidang Kebersihan*. Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Tangerang Selatan
- Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan, 2006. *Panduan Pengambilan Data denan Metode Rapid Rural Appraisal (RRA) dan Participatory Rural Appraisal (PRA)*. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadanan Sumberdaya Alam, Kota Jakarta.
- Dwidjowijoto dan Wrihatnolo. 2007. *Analisis Kebijakan*. Elexmedia Komputindo, Jakarta.
- Faizah, 2008. *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)*. Tugas Akhir. Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, Kota Semarang.
- Hadi Purbathin Agus, Risaldy Sabil, 2004. *Laporan Hasil Perencanaan Partisipatif bersama Masyarakat di Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah*. Aliansi Lembaga Adidaya Masyarakat (ALA) , Propinsi Nusa Tenggara Barat
- Heri Krisnandar, 2013. *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Secara Mandiri Berbasis Masyarakat*. Tugas Akhir. Program Pascasarjana Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya.
- Hernawati Devi, Saleh Choirul, dan Suwondo, 2012. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Studi Pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di Desa Mulyoagung Kecamatan Dan Kabupaten Malang*. Studi Jurusan Adminisyrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Kota Malang.
- Institut Pertanian Bogor, 2012. *Participatory Rural Appraisal (PRA)*. Center for alternative dispute Resolution and Empowerment, Bogor
- Kuncoro Sejati. 2009. *Pengolahan Sampah Terpadu*. Kanisius, Yogyakarta.
- Maharani Dwijayanti, 2009. *Upaya Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Pengelolaan Sampah di Kota Surabaya*. Jurnal Program Ilmu Lingkungan Universitas Surabaya, Kota Surabaya
- Migristine Ririn, 2007. *Pengolahan Sampah Plastik*. Penerbit Titian Ilmu, Bandung
- Master Plan TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan
- Sejati Kuncoro, 2009. *Pengolahan Sampah Terpadu*. Kanisus, Yogyakarta
- Sherry R Arnstein. 2010. *A Ladder of Citizen Partication*. 1971. Jakarta
- Syamsi. Ibnu. 1986. *Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional* . CV. Rajawali, Jakarta
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1996. *Perencana Pembangunan*. PT. Gunung Agung, Kota Jakarta.
- Wikipedia. 2014. *Sampah*. <http://id.wikipedia.org/wiki/Sampah>
- Yulinah Trihadiningrum. 2010. *Perkembangan Paradigma Pengelolaan Sampah Kota dalam Rangka Pencapaian MDG's*. Buku MDG's Sebentar Lagi. Sanggupkah Kita Menghapus Kemiskinan di Dunia? Editor: B. Sulisty, J. Perdanakusuma, N. Leksono. Penerbit KOMPAS, Jakarta